

KAPASITAS ORGANISASI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA UNGGULAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DESY SAPTARI¹, ELISA SUSANTI², YOGI SUPRAYOGI³

^{1,2,3}Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
elisa.susanti@unpad.ac.id

ABSTRACT

This research was motivated by tourism places in Tasikmalaya Regency which still have not yet developed well. The development of tourism should depend on 3A principles of tourism; attraction, accessibility, and amenity, which in fact, all those factors were not in good condition. The tourism place did not attract tourists, the place was still inaccessible, and the amenity was not yet completed. Tourism, Youth, and Sport Department of Tasikmalaya Regency, as stakeholder, was in charge of have a complete organization in order to reach the goal in developing those superior tourism places there. Thus, this research was aimed to find out how the Tourism, Youth, and Sport Department of Tasikmalaya Regency developed its superior tourism places. This research used Douglas Hortin and others' theory about 5 dimensions of organization capacity which consist of staffs; infrastructure, technology, and finance; strategic leadership; process and program management; and network/relation with other organizations. It used a qualitative method by utilizing literature study and purposive to determine informants as data collecting technique. While data were analyzed by triangulation of resources. The result showed that there was still a lack of capacity of the Tourism, Youth, and Sport Department in developing superior tourism places. It could be seen in human resource capacity, infrastructure, technology and finance factors were inadequate, so it affected process and program management and network/relation with other party capacity. On the other hand, its strategic leadership capacity had been well-prepared yet it should be improved. There was about suggestion such as the department should do cooperation with education party through field working practice in Tourism, Youth, and Sport Department to handle and do coaching toward tourism executor group (known as Kompepar) in the hope that to maximise its role in developing superior tourism places in Tasikmalaya Regency. In addition, it should have been legalized Regional Tourism Development Master Plan (known as Rapperda) to emphasise tourism development which was based on those 3A principles of tourism

Keywords: Organizational Capacity, Tasikmalaya regency Youth Tourism and Sports Office, Top Tourism

CAPACITY OF ORGANIZATION AT TOURISM, YOUTH AND SPORTS SERVICE AGENCY IN TASIKMALAYA DISTRICT ON DEVELOPING SUPERIOR TOURISM AT TASIKMALAYA DISTRICT

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang Tindakan Korektif Dalam Penanganan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan tindakan korektif dalam penanganan Maladministrasi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teori yang dikemukakan oleh (Sharonina, 2010) dijadikan sebagai acuan, dimana tindakan korektif di Ombudsman terbagi kedalam tiga tahap, yaitu : Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Pemeriksaan Laporan dan Monitoring Laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan korektif di Ombudsman Perwakilan Jawa Barat sudah sesuai dengan ke 5 tahapan teori tersebut. Namun demikian permasalahan masih belum efektifnya tindakan korektif disebabkan belum terpenuhinya kebutuhan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut. Konsep baru yang dihasilkan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dalam tindakan korektif Ombudsman Perwakilan Jawa Barat juga terdapat kebutuhan. Dimana tindakan korektif dalam dilaksanakan sesuai tahapannya dengan baik ketika kebutuhan dapat terpenuhi.

Kata kunci: Kapasitas Organisasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, Pariwisata Unggulan

PENDAHULUAN

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang terkategori sebagai Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Provinsi (KSPP) Jawa Barat, yang artinya bahwa Kawasan tersebut potensial untuk dilakukan pengembangan pariwisata. Hal ini tentunya menjadi potensi bagi kabupaten Tasikmalaya untuk mengembangkan pariwisatanya, yang mana saat ini memfokuskan pariwisata sebagai strategi pembangunan daerahnya. Pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya penting untuk dikembangkan guna menarik wisatawan dan mampu memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pada nyatanya Kabupaten Tasikmalaya secara perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pariwisata masih minim dan lebih banyak mengandalkan dana bantuan. Dari berbagai pariwisata yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya, saat ini memiliki dua pariwisata unggulan dengan pertimbangan hasil riset pariwisata yang paling potensial dan lokasi strategis yang dimilikinya.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai lokomotif dalam mengembangkan pariwisata unggulan Kabupaten Tasikmalaya semestinya mampu melakukan pengembangan, namun fenomena di lapangan masih kurangnya pengembangan. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pun dituntut untuk memiliki kelengkapan organisasi guna mampu mencapai tujuannya untuk mengembangkan pariwisata unggulan.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana kapasitas organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan pariwisata unggulan Kabupaten Tasikmalaya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan karena dengan pendekatan tersebut dirasa relevan dengan fenomena yang ada di lapangan, yaitu tidak dapat diukur secara tepat. Sehingga, untuk memperoleh pemahaman yang tepat diperlukan deskripsi terkait kapasitas yang dimiliki organisasi sehingga dapat menggambarkan kondisi kapasitas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga saat ini. Dengan pendekatan kualitatif, penulis melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara terhadap informan yang mengetahui seluk-beluk informasi yang dibutuhkan penulis, terjun langsung dalam pengembangan pariwisata, dan memiliki kesediaan waktu. Selain itu, dibantu juga oleh kesediaan data-data atau dokumentasi yang dimiliki dinas guna mendukung penelitian yang dilakukan. Setelah terkumpulnya informasi dan data yang

dibutuhkan, maka selanjutnya penulis melakukan analisis data dengan menyusun hasil perolehan informasi dan data guna mampu mendeskripsikan kondisi lapangan, kemudian setelah disusun dan dianalisis di tariklah suatu kesimpulan terkait bagaimana kapasitas organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam Mengembangkan Pariwisata Unggulan Kabupaten Tasikmalaya. Metode deskriptif pun berupa penjelasan mengenai data yang dikumpulkan, sehingga mampu menjelaskan suatu permasalahan Teknik pengujian kredibilitas data menggunakan triangulasi sumber, kemudian selanjutnya direduksi, disajikan, kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa kapasitas anggota staf (staff members) dilihat dari beberapa aspek, yaitu

- 1) Kemampuan staf untuk tinggal di bidangnya dengan melihat prosedur perekrutan, jumlah pegawai, dan kompetensi pegawai
- 2) Pengembangan pegawai
- 3) Toleransi pegawai

Aspek kemampuan staf untuk tinggal di bidangnya belum memadai yang mana dari sisi jumlah pegawai yang masih kurang dan dipengaruhi juga oleh kebijakan perekrutan pegawai saat ini yang dilaksanakan oleh pusat serta secara kompetensi pegawai yang dimiliki belum mendukung kompetensi yang dibutuhkan guna mendukung pengembangan pariwisata unggulan. Aspek pengembangan pegawai pun belum memadai yang mana berdasarkan daftar normatif pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Desember 2018 bahwa sejauh ini belum ada pegawai yang pernah mengikuti pelatihan kepariwisataan, dominannya adalah mengikuti prajabatan dan diklatpim sesuai tingkatannya. Begitu pun dengan aspek toleransi pegawai, adapun sistem rotasi dan mutasi bagi petugas objek wisata namun itu pun belum mampu memberikan dampak perubahan yang lebih baik terhadap kinerja pegawai.

Kapasitas infrastruktur, teknologi, dan keuangan (*infrastructure, technology, and financial resources*) belum memadai, yang dilihat pada beberapa aspek di dalamnya :

- 1) Infrastruktur dilihat dari aspek jumlah dan jenis infrastruktur, kualitas bangunan, perencanaan infrastruktur, dan adaptasi terhadap kebutuhan yang muncul

- 2) Teknologi, dengan melihat bagaimana pemanfaatan keberadaan teknologi saat ini dalam mendukung pengembangan pariwisata unggulan
- 3) Keuangan, dengan melihat dana yang dikeluarkan untuk mengembangkan pariwisata unggulan

1) Infrastruktur

- A. Jenis infrastruktur yang dimiliki, yaitu kendaraan roda dua, roda empat, komputer, dan internet. Kendaraan roda dua semestinya diutamakan bagi para pegawai yang sering melakukan pelaporan dan para petugas objek. Sejauh ini, kendaraan roda dua berjumlah 14 yang mana sebanyak 10 kendaraan diperuntukkan bagi petugas objek wisata. Namun kondisinya kurang layak karena mengingat aksesibilitas dari objek wisata menuju ke kantor dinas memerlukan kendaraan yang prima dan secara perolehan aset kendaraan semestinya telah diperbaharui. Untuk kendaraan roda empat diperuntukkan para pejabat struktural seperti untuk perjalanan dinas atau tugas di luar kantor. Keberadaannya pun belum sesuai kebutuhan, kendaraan roda empat yang dibutuhkan sebanyak 9 namun saat ini hanya berjumlah 5. Komputer yang dimiliki pun hanya berjumlah 1 pada setiap bidang, sedangkan rata-rata pada setiap bidang memiliki 2-3 seksi.
- B. Kualitas bangunan yang dimiliki masih terkategori bangunan lama yang mana kantor yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya sejak 2012 dominannya telah berpindah ke Singaparna. Selain itu, masih perlu dilengkapinya perlengkapan kantor seperti rak arsip serta privasi untuk ruang tamu.
- C. Perencanaan infrastruktur, telah dimilikinya mekanisme perencanaan infrastruktur namun belum efektif dilaksanakan dan memunculkan kebutuhan baru, yaitu adanya analisis perencanaan karena sejauh ini perencanaan yang dilakukan kurang memperhatikan SHBP yang diberikan oleh bagian aset dan keuangan.
- D. Adaptasi terhadap kebutuhan yang muncul, mengingat kondisi infrastruktur yang belum memadai maka upaya yang dilakukan dengan pengadaan dengan dana pribadi atau pun dengan sistem *reimburse*.

2) **Teknologi**, sejauh ini belum dimilikinya website yang mana dalam undang-undang kepariwisataan pun

keberadaan website ini dapat menunjang kemudahan akses informasi terkait pariwisata daerah. Dalam pengadaan website pun akan memunculkan kebutuhan baru, seperti komputer yang mumpuni khusus pengelola website, ahli pengelola website, serta anggaran untuk melakukan pengelolaan website.

3) **Keuangan** yang dikeluarkan untuk mengembangkan pariwisata unggulan yaitu masih terbatas karena secara perolehan dari APBD pun masih minim. Upaya yang dilakukan guna memperoleh bantuan anggaran yaitu dengan mengajukan bantuan ke provinsi/pusat yang itu pun belum mampu menutupi kebutuhan anggaran untuk mengembangkan pariwisata unggulan.

Kapasitas kepemimpinan strategis yaitu dilihat pada 4 aspek :

- 1) Kemampuan menafsirkan lingkungan di luar organisasi, sudah memadai yang dilihat dengan upaya yang dimiliki disparpora dengan sering mengikuti seminar kepariwisataan sehingga mengetahui isu terkini terkait kepariwisataan. Saat ini pun yang sedang dihadapi adalah perbedaan nomenklatur antara pariwisata provinsi sebagai dinas pariwisata dan kebudayaan dan pariwisata kabupaten Tasikmalaya sebagai dinas pariwisata pemuda dan olahraga. Hal ini berdampak pada birokrasi yang harus dilalui ketika ada event kepariwisataan.
- 2) Menetapkan arah organisasi, sudah memadai dengan telah dimilikinya tujuan dan sasaran organisasi serta indikator tercapainya tujuan tersebut. Disparpora pun telah memiliki rencana strategis dan rencana kerja untuk menjadi arah pengembangan pariwisata, namun tetap perlu dilengkapinya dokumen pengembangan pariwisata dengan dimilikinya rencana induk pengembangan pariwisata daerah (Ripparda).
- 3) Motivasi pegawai, sudah memadai khususnya motivasi bagi petugas objek yang secara status kepegawaiannya tidak semua sebagai pegawai tetap namun ada juga sebagai sukarelawan, secara perolehan gaji pun berdasarkan pembagian dari koordinator lapangan. Upaya untuk memotivasi pegawai tersebut yaitu dengan mendaftarkannya dalam BPJS ketenagakerjaan.
- 4) Pemantauan dan evaluasi, sudah memadai dengan adanya bentuk pemantauan dan evaluasi berupa sasaran kinerja pegawai (SKP) yang di dalamnya tidak hanya mengukur pencapaian secara tupoksi namun juga ada penilaian terhadap perilaku pegawai.

Kapasitas Manajemen program dan proses yaitu bagaimana organisasi melakukan pengelolaan terhadap program pengembangan pariwisata unggulan serta mempersiapkan baik itu alam, manusia, atau lainnya guna mendukung tercapainya tujuan program. Manajemen program pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yaitu memilikinya prosedur dalam pembuatan program hingga ke pembuatan laporan setiap triwulan, namun tujuan dari program untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan tidaklah tercapai. Manajemen proses berupa kesediaan sumber daya manusia guna melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pun belum dapat terealisasi karena masalah kuantitas sumber daya manusia pun masih kurang, sehingga mengutamakan pekerjaan administratif di kantor.

Kapasitas jaringan/hubungan dengan organisasi lain dibentuk guna memudahkan pencapaian tujuan dalam mengembangkan pariwisata unggulan. Se jauh ini, jaringan mitra yang dibangun oleh pemerintah yaitu kelompok penggerak pariwisata (kompepar) sebagai kelompok masyarakat di setiap daerah wisata yang diharapkan mampu ikut serta dalam mengembangkan pariwisata unggulan. Namun sejauh ini hanya dilibatkan pada kegiatan seminar atau pun ketika ada isu strategis di objek dan masih kurangnya ruang antara dinas dengan kompepar. Begitu pun dengan pembinaan yang belum dapat terprogram.

Hubungan kerja sama dengan organisasi lain pun dibentuk diantaranya sebagai berikut.

Tabel Organisasi lain yang berhubungan dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan pariwisata unggulan Kabupaten Tasikmalaya

No	Organisasi	Kegiatan dalam Pengembangan
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya	Mempromosikan pariwisata unggulan melalui media yang dimilikinya
2	Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya	Mempromosikan Usaha Kecil Menengah (UKM) sekaligus keberadaan pariwisata unggulan
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Mendukung perizinan bagi investor untuk berinvestasi di pariwisata unggulan

	Terpadu Satu Pintu	
4	Jasa Raharja	Asuransi jiwa bagi wisatawan yang berkunjung

(Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2019)

Meskipun saat ini pariwisata menjadi strategi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, namun sejauh ini belum dapat dimaksimalkan potensinya oleh dinas pariwisata pemuda dan olahraga. Dalam artian, masih jarang dilakukan rapat lintas sektoral guna mendiskusikan pengembangan pariwisata unggulan ke depan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kapasitas anggota staf belum memadai. Hal ini dilihat pada kuantitas dan kompetensi pegawai yang masih minim untuk mendukung pengembangan pariwisata unggulan. Kapasitas infrastruktur, teknologi, dan keuangan belum memadai, yang dilihat pada kapasitas infrastruktur yang kuantitasnya dan kualitasnya belum memadai untuk mendukung pelaksanaan operasional dalam mengembangkan pariwisata unggulan. Kapasitas teknologi pun belum memadai yang dilihat dari belum dimilikinya *website* guna mendukung pengembangan pariwisata unggulan Kabupaten Tasikmalaya. Kapasitas Keuangan pun masih minim yang dilihat dari kesenjangan antara anggaran dan realisasi anggaran.

Kapasitas anggota staf, infrastruktur, teknologi, dan keuangan yang belum memadai berdampak terhadap kapasitas manajemen program dan proses. Dampaknya yaitu belum dapat terlaksananya pemantauan ke pariwisata unggulan dikarenakan kurangnya anggaran dan infrastruktur menuju ke objek. Begitu pun dengan manajemen proses yang mana belum adanya penyediaan kebutuhan sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan manajemen program. Selain itu, berdampak pula pada kapasitas jaringan/hubungan dengan organisasi lain yaitu belum dapat terlaksananya program rutin berupa pembinaan terhadap mitra atau pun pertemuan lintas sektor yang dapat memaksimalkan pengembangan pariwisata unggulan. Hal tersebut belum dapat terlaksana karena kapasitas keuangan yang masih terbatas. Adapun saran yang penulis rekomendasikan untuk kapasitas organisasi pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut.

- 1) Dalam rangka mengatasi jumlah pegawai serta kompetensi pegawai dengan keahlian yang mendukung pengembangan pariwisata, maka sebaiknya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga membentuk program kerjasama rutin dengan lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi pariwisata berupa program praktek kerja lapangan/ magang.
- 2) Dalam rangka mengatasi permasalahan kuantitas sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, penulis menyarankan untuk secara internal mengkoordinasikan dengan baik terkait perencanaan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan guna merencanakan kebutuhan yang bukan hanya hal-hal teknis namun hingga ke pembiayaan dan pemeliharannya sehingga mampu merancang anggaran dengan perolehan yang mencukupi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
- 3) Upaya dalam mengatasi permasalahan pemberian pembinaan terhadap kelompok penggerak pariwisata (Kompepar), Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan/ perguruan tinggi kepariwisataan, diantaranya menjadikan daerah objek wisata sebagai daerah untuk dilaksanakannya Kuliah Kerja Nyata dengan catatan harus diadakannya kegiatan yang dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait kepariwisataan, misalnya saja sadar wisata, sapa pesona, dan lainnya. Hal ini dilakukan guna dapat memaksimalkan peran kelompok penggerak pariwisata (kompepar).
- 4) Meningkatkan dan memaksimalkan hubungan dengan organisasi lintas sektoral untuk bekerja sama mengembangkan pariwisata unggulan kabupaten Tasikmalaya. Salah satunya dengan adanya pertemuan rutin lintas sektor untuk membahas kebutuhan pengembangan pariwisata unggulan Kabupaten Tasikmalaya, terlebih lagi saat ini pariwisata menjadi strategi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.
- 5) Sebaiknya, segera dimilikinya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Tasikmalaya, guna memperjelas arah pengembangan yang merujuk pada kunci 3A pariwisata, yaitu Atraksi, aksesibilitas, dan amenitas

DAFTAR PUSTAKA

- Horton, Alexaki, & Bennet-Lartery, B.C. (2003). *Evaluating Capacity Development : Experiences from research and development organizations around the world*.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karyono, A.H. (1997). *Kepariwisataan*. Jakarta: Grasindo.
- Lusthaus, C., Anderson, G., Murphy, E., Lusthaus, C., Anderson, G., & Murphy, E. (2004). *The Basics of Capacity, Organizational Capacity Development, and Evaluation. INSTITUTIONAL ASSESSMENT A Framework for Strengthening Organizational Capacity for IDRC's Research Partners*. Retrieved from <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN024593.pdf>
- Robbins, S. P. (1994). *Teori Organisasi: struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yoeti. (2008). *Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Proyek Penulisan dan Penerbitan Buku Depdikbud.
- Eisinger, P. (2002). *Organizational capacity and organizational effectiveness among street-level food assistance programs. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*.
- Halimah, M., & Karyana, A. (2012). *Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan. Jurnal Manajemen Publik*, 74-87.
- Hendartina, N. L. (2014). *Analisis Perubahan Kelembagaan dan Dampak Pengganda (Multiplier Effect) Pengembangan Kawasan Wisata Studi kasus Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya*. Institut Pertanian Bogor.
- (Milen, 2004) dalam Ratnasari, Jenivia Dwi Makmur, Mochamad Ribawanto, H. hlm. 105.
- (2013). *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 103–110.
- Sari, N., Noor, I., & Prasetyo, W. Y. (2014). *DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 634–640.

Sintaningrum, & Setiawan, T. (2002). Quo Vadis Kebijakan Kawasan Agropolitan di Indonesia? *Jurnal Manajemen Publik*, 88-102.

Sugandi, Y. S. (2008). Social Policy Experience In Indonesia : Case Study On Unconditional Cash Transfer Program. *Jurnal Manajemen Publik*.

Sukarno, D. (n.d.). Infrastruktur dan Teknologi Pada Kecamatan- Kecamatan di Kabupaten Bandung Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). *Jurnal Manajemen Publik*, 109-124.

Soeprapto, H. . R. (2006). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance (pp. 1-45).

Ting, M. M. (2011). Organizational capacity. *Journal of Law, Economics, and Organization*.

Bryan, T.K. (2011). *Exploring the Dimensions of Organizational Capacity for Local Social Service Delivery Organizations Using a Multi-Method Approach*. Virginia Polytechnic Institute and State University, Public Administration. Alexandria, Virginia: Tara Kolar Bryan.

Aprinaldi, L. (2018). *Kapasitas Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Dalam Mengelola Cagar Budaya di Kawasan Pusat Kota Bandung*. Universitas Padjadjaran.

Keban, Y. T. (2000). Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan. *Universitas Gajah Mada*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (2016-2021).

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya. (2017).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2017). Kabupaten Tasikmalaya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya. (2017).

Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. (2017).

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. (2009).

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. (2014).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun. (2015).

Cespratama. (2010). Konsep Pengembangan Pariwisata. Retrieved from id.scribd.com/doc/27064086/A-Konsep-Pengembangan-Pariwisata-Pengembangan-Pariwisata-Merupakan

Hewlett, W. F. (2017). A Guide to Organizational Capacity Assessment Tools Finding—and Using—the Right Tool for the Job, (October). Retrieved from <https://www.hewlett.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Guide-to-Using-OCA-Tools.pdf>

Indonesia.tempo.com. (2018). *Penataan Cipanas Galunggung*. Retrieved from m.ayobandung.com/read/2018/10/17/39325/liputan-khas-gunung-api-pengelolaan-wisata-galunggung-tidak-digarap-serius

Lafond, A., & Brown, L. (2003). A Guide to Monitoring and Evaluation of Capacity-Building Interventions in the Health Sector in Developing Countries — MEASURE Evaluation. *Population (English Edition)*.